

**PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, AKUNTABILITAS,
TRANSPARANSI, TERHADAP KINERJA PEMERINTAH
DAERAH OKU TIMUR**

(Studi kasus pada Organisasi Pemerintah Daerah OKU Timur)

SKRIPSI



Nama : Annisa Ramadhani

Nim : 22 2015 278

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2019

**PENGARUH PENGELOLAAN KEUANG DAERAH, AKUNTABILITAS,
TRANSPARANSI, TERHADAP KINERJA PEMERINTAH
DAERAH OKU TIMUR**

(Studi kasus pada Organisasi Pemerintah Daerah OKU Timur)

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Nama : Annisa Ramadhani

Nim : 222015278

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2019

Fakultas Ekonomi
dan Bisnis
Universitas
Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah,
Akuntabilitas, Transparansi terhadap Kinerja
Pemerintah Daerah OKU Timur (Studi Kasus
pada Organisasi Perangkat Daerah OKU
Timur)

Nama : Annisa Ramadhani

Nim : 222015278

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal, Januari 2019

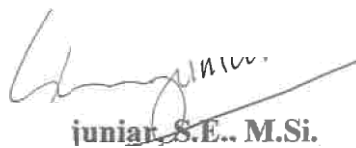
Pembimbing II,

Pembimbing I,



H. Yuharis Lad, S.E., Ak., M.Si., CA

NIDN/NBM: M26016901/765380



Annisa Ramadhani, S.E., M.Si.

NIDN/NBM: M0220067101/1115716

Mengetahui,

Dekan

Program Studi Akuntansi



Betris S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM: 0216106902/

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Annisa Ramadhani
NIM : 222015278
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah OKU Timur (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah OKU Timur)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata Satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Februari 2019



Annisa Ramadhani

ABSTRAK

Annisa ramadhani/222015278/2019. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah OKU Timur Studi kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten OKU Timur.

Penelitian ini dibuat untuk menjawab masalah yaitu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh antara pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah OKU Timur, seberapa besar pengaruh antara akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah OKU Timur, seberapa besar pengaruh antara transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah OKU Timur. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah OKU Timur, untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah OKU Timur, untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah OKU Timur. Variabel dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan daerah (X_1), Variabel akuntabilitas (X_2), Variabel transparansi (X_3), Variabel kinerja pemerintah daerah (Y). Jenis penelitian ini adalah asosiatif dan deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah 33 OPD Kabupaten OKU Timur. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data yaitu kuantitatif menggunakan uji regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sebagian, pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Sedangkan transparansi tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Disarankan kepada penelitian selanjutnya agar dapat memperluas objek penelitian, dapat menambah periode penelitian serta menambahkan variabel lain yang dapat digunakan untuk mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

Kata kunci: Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja Pemerintah Daerah

ABSTRACT

Annisa Ramadhani/222015278/2019. The influence of regional financial management, accountability, and transparency on regional government's performance(case study on the device organization of the east OKU district).

This study was made to answer the problem statement in this study, namely how much influence between regional financial management on the performance of the East OKU regional government, how much influence between accountability on the performance of the East OKU regional government, how much influence between transparency on the performance of East OKU regional government. With the aim of the research is to find out the effect of regional financial management on the performance of the East OKU regional government, to determine the effect of accountability on the performance of the East OKU regional government, to determine the effect of transparency on the performance of the East OKU regional government. The variables in this study are regional financial management (X1), accountability variables (X2), transparency variables (X3), regional government performance variables (Y). This type of research is associative and descriptive. The data used is primary data. The population in this study was 33 East OKU District OPD. Data collection techniques in this study were using questionnaires and interviews. The data analysis technique uses data analysis techniques, namely quantitatively using multiple regression tests. The results showed that, in part, regional financial management and accountability had a positive influence on local government performance. While transparency had no effect and was not significant on the performance of local governments. It is recommended that further research be able to expand the object of research, can add to the period of research and add other variables that can be used to influence the performance of local governments.

Keywords :*regional financial management, accountability, transparency, regional government's performace*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamualaikum, wr.wb

Alhamdulillah Robbil'alamiin, tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan ridho-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah OKU Timur (Studi kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten OKU Timur)”**, sebagai upaya melengkapi syarat untuk mencapai jenjang Sarjana Strata 1 pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Fokus utama dari kinerja pemerintah daerah adalah pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas, pengukuran mengenai pengelolaan keuangan daerah merupakan indikator yang baik untuk menentukan atau menilai kemampuan OPD dalam menghasilkan kinerja yang baik di masa yang akan datang. Transparansi dibutuhkan karena kadangkala terdapat penyimpangan dalam anggaran maka jika setiap OPD sudah transparan akan menggambarkan kondisi OPD yang sesungguhnya.

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan serta bab simpulan dan saran. Meski dalam

penulisan skripsi ini, penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Ucapan terima kasih penulis juga sampaikan terutama kepada orang tua Ayahanda saya bapak Iskandar,S.H dan Ibunda saya Ibu Nirwana serta keluarga yang doa dan bantuan memiliki makna besar dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terimah kasih kepada Ibu Dr,Hj.Yuhanis Ladewi, S.E.,Ak.,M.Si.CA dan Ibu Lis Djuniar, S.E., M.Si. yang telah membimbing dan memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli S.E.,M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang. Beserta staf dan karyawan
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan ,M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri, S.E.,Ak.,M.Si.CA selaku Ketua Jurusan Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang sekaligus dosen pembimbing akademik saya dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si. selaku Sekertaris Jurusan Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak dan ibu dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta para staf dan karyawan
5. Serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah OKU Timur yang telah membantu dan mengizinkan saya untuk melakukan penelitian.

6. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah membalas budi baik atas seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini, atas perhatian dan masukan saya ucapkan terimakasih.

Palembang, Februari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRACT	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	
A. Landasan Teori	10
1. Pengelolaan keuangan daerah.....	10
a. pengertian pengelolaan keuangan daerah.....	10
b. pengukuran pengelolaan keuangan daerah.....	11
2. Akuntabilitas.....	15
a. pengertian akuntabilitas.....	15
b. pengukuran akuntabilitas.....	16
3. Transparansi.....	20
a. Pengertian transparansi	20
b. Pengukuran transparansi	21
B. Kerangka pemikiran	28
C. Hipotesis	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	39
C. Operasionalisasi Variabel.....	39
D. Populasi dan Sampel	41
E. Data yang digunakan	43
F. Metode Pengumpulan Data	44
G. Analisis Data dan Teknik Analisis	45
1. Teknik Analisis	45
a. Uji Validitas	45
b. Uji Reabilitas.....	45
a. Uji Asumsi Klasik	46
1) Uji Normalitas Data.....	46

2) Uji Multikolinearitas	46
3) Uji Heterokedastisitas.....	47
4) Uji Autokorelasi	47
b. Analisis Regresi Berganda	48
c. Uji Hipotesis	48
2. Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	49
1. Profil responden.....	49
B. Hasil Pengolahan Data.....	52
1. Hasil statistik deskriptif.....	52
a) Variabel pengelolaan keuangan daerah X1	52
b) Variabel akuntabilitas X2.....	55
c) Variabel transparansi X3.....	57
d) Variabel kinerja pemerintah daerah Y	58
2. Pengujian Validitas dan Reabilitas Data.....	60
a) Hasil Uji Validitas	61
b) Hasil Uji Reabilitas	64
3. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	66
a) Hasil Uji Normalitas.....	66
b) Hasil Uji Multikolinearitas	67
c) Hasil Uji Heterokedastisitas.....	68
d) Hasil Uji Autokorelasi	69
4. Hasil Analisis Regresi Berganda	71
5. Hasil Uji Hipotesis	74
a) Hasil Uji Signifikansi Parameter Bersama (Uji F).....	74
b) Hasil Uji Statistik Parsial (Uji t).....	76
C. Pembahasan Penelitian.....	80
1. Hasil Uji Hipotesis pengelolaan keuangan daerah (X1), Akuntabilitas (X2), Dan Transparansi (X3) terhadap Kinerja pemerintah daerah (Y) .	80
2. Hasil Uji Hipotesis pengelolaan keuangan daerah (X1) terhadap kinerja pemerintah daerah (Y).....	81
3. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Akuntabilitas(X2) terhadap kinerja pemerintah daerah (Y).....	82
4. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Transparansi (X1) terhadap kinerja pemerintah daerah (Y).....	82
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
1. Simpulan	83
2. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA	89
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Penelitian Sebelumnya	35
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel	40
Tabel III.2	Daftar Populasi OPD OKU Timur	42
Tabel IV.1	karakteristik responden.....	49
Tabel IV.2	Deskriptif pengembalian kuesioner.....	52
Tabel IV.3	Frekuensi variabel pengelolaan keuangan daerah.....	53
Tabel IV.4	Frekuensi pernyataan variabel pengelolaan keuangan daerah	54
Tabel IV.5	Frekuensi variabel akuntabilitas.....	55
Tabel IV.6	Frekuensi pernyataan variabel akuntabilitas	56
Tabel IV.7	Frekuensi variabel transparansi.....	57
Tabel IV.8	Frekuensi pernyataan variabel transparansi.....	58
Tabel IV.9	Frekuensi variabel kinerja pemerintah daerah	59
Tabel IV.10	Frekuensi pernyataan variabel kinerja pemerintah daerah	60
Tabel IV.11	Hasil Uji validitas X1	61
Tabel IV.12	Hasil Uji validitas X2.....	62
Tabel IV.13	Hasil Uji validitas X3	63
Tabel IV.14	Hasil Uji validitas Y	64
Tabel IV.15	Hasil Uji Reabilitas	65
Tabel IV.15	Hasil Uji Autokorelasi <i>Durbin-Watson-Test</i>	68
Tabel IV.16	Hasil Uji Multikolinearitas	69
Tabel IV.17	Hasil Uji Regresi Berganda	74
Tabel IV.18	Hasil Uji f	75
Tabel IV.19	Hasil Uji f	75
Tabel IV.20	Hasil Uji parsial	76
Tabel IV.21	Hasil Uji t.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Pemikiran.....	36
Gambar IV.1	Hasil Uji Normalitas dengan P-Plot.....	65
Gambar IV.2	Hasil Uji Heterokedastisitas	68

DAFTAR LAMPIRAN

- Laampiran 1 Daftar populasi OPD OKU timur
- Lampiran 2 Hasil Perhitungan SPSS
- Lampiran 3 Tabel Statistik
- Lampiran 4 Surat Selesai Riset
- Lampiran 5 Sertifikat TOEFL
- Lampiran 6 Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Quran
- Lampiran 7 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8 Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah dituntut untuk melaksanakan kinerja yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Tuntutan akan kinerja pemerintah yang baik ini terjadi hampir disemua pemerintahan seiring dengan diterapkannya konsep otonomi daerah dan penetapan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan pemerintahan.

Tingginya berbagai asumsi masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan kinerja pemerintah menjadi salah satu isu yang menjadi sorotan publik. Isu tentang kinerja pemerintah daerah ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat. Dikarenakan masyarakat belum merasakan hasil kinerja pemerintah secara maksimal. Rakyat menuntut pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah.

Perkembangan organisasi sektor publik yang semakin pesat menuntut pemerintah agar melakukan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Penyerahan kewenangan pemerintah pusat ke daerah telah menimbulkan dampak yaitu korupsi yang begitu marak dan semakin kuat di daerah.(Hendra, 2017: 2)

Kinerja pemerintah adalah salah satu bentuk penilaian atas manfaat dan efisiensi dalam penggunaan anggaran keuangan dalam organisasi sektor publik, setelah adanya operasional anggaran langkah selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi dan akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang baik (Rachmat, 2010: 316). Kinerja pemerintah dikatakan baik dapat dilihat dari tingkat pencapaian hasil yang dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program berhasil atau tidaknya diperlukan pengukuran kinerja sebagai alat ukur. Pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah daerah dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan dan membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan yang diberikan pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan tersebut (Ulum, 2012: 20).

Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Kinerja instansi pemerintah berkaitan erat dengan pengelolaan, akuntabilitas, transparansi. Memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat.

Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Menurut Baldrick (2017:12) Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Menurut Hendra (2017: 10) Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban.

Menurut Abdul (2016: 56) Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Muindro, 2012: 14). Menurut Kerangka Konseptual, Standar Akuntansi Pemerintah, 2015 Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Jadi berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya sebagai bentuk pemenuhan

hak-hak publik yang sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada masyarakat secara periodik. Akuntabilitas publik adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Aspek penting yang harus dipertimbangkan yaitu: 1) aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya, 2) aspek pengelolaan (*sterwarship*) keuangan daerah secara baik, perlindungan asset fisik dan finansial mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus.

Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang *accountable* untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu. Konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada

rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya.

Selain akuntabilitas diperlukan juga transparansi dalam kinerja pemerintah. Menurut Abdul (2016: 56) Transparansi pengelolaan keuangan pemerintahan daerah merupakan tuntutan publik yang harus direspon secara positif. Dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual. Menurut Kerangka Konseptual, Standar Akuntansi Pemerintah, (2015) Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaannya pada peraturan perundang-undangan.

Fenomena terjadi saat ini, Pengelolaan keuangan daerah selama ini bukannya membaik tapi malah memburuk kita juga mendapatkan informasi tampaknya korupsi kebocoran keuangan kita itu bisa mencapai 20 samapai 40% semestinya dana itu bisa dimaksimalkan untuk program pembangunan seperti infrastruktur tetapi karena terjadi kebocoran dana itu terasa kurang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. (Sri Adiningsih, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden).

Selain itu fenomena sejenis hampir setiap tahunnya ditemukan tindak penyimpangan anggaran secara berulang-ulang pada dinas/bidang yang

sama buruknya praktek transparansi pada pemerintah daerah juga menjadi salah satu penyebabnya hasil pemeriksaan BPK di pemerintahan kabupaten Musi Banyuasin mungungkan ada sebanyak enam temuan penyimpangan penggunaan anggaran dari empat SKPD yg telah menyebabkan kerugian keuangan daerah. (Nunik Handayani, Koordinator FITRA Sumsel)

Fenomena yang terjadi di daerah OKU Timur yaitu realisasi anggaran perjalanan dinas pada dua SKPD tidak dapat diyakini kebenarannya, hasil pemeriksaan terhadap bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas anggota DPRD berupa tiket yang digunakan sebagai salah satu bukti pertanggungjawaban, tidak ditemukan dalam database pada portal *e-audit* BPK maskapai Garuda Indonesia sebanyak 35 perjalanan dinas atau sebesar Rp.270.286.170,00 sehingga realisasi tersebut tidak dapat diyakini. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah Bapedalda menunjukkan beberapa kelemahan pengendalian.(Abdul aziz, Ketua DPW LP2I).

Selain itu juga fenomena sejenis ini terdapat kasus korupsi, kasus ini terkuak setelah adanya dugaan penyalahgunaan wewenang jabatan dan korupsi dana RSUD OKUT tahun 2014-2015 dengan anggaran Rp. 6.400.000.000. Hasil audit BPKP Sumsel, ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 540.000.000 . Anggaran yg diselewengkanterangka tersebut dengan modus memanipulasi anggaran gaji dokter spesialis yang dipekerjakan di rumah sakit yang dipimpinnya.(Hari Setiyon, Wakil Kajati Sumsel)

Penelitian ini pernah dilakukan oleh Nopriansyah (2016). Hasil menunjukkan pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di pemerintah provinsi Sumatera Utara. Secara parsial pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja pemerintah daerah, sedangkan variabel transparansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Diana dkk (2017) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi berpengaruh signifikan dan searah/positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Kotamobagu, Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan dan searah/positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Kotamobagu, dan Pengawasan Internal tidak berpengaruh signifikan dan searah/positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Kotamobagu.

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fanny dkk (2015). Hasil penelitian ini menyatakan Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan Transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah OKU Timur.**

B. Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh antara pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah OKU Timur?
2. Seberapa besar pengaruh antara akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah OKU Timur?
3. Seberapa besar pengaruh antara transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah OKU Timur?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah OKU Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah OKU Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah OKU Timur.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat bagi penulis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah OKU Timur.

2. Manfaat bagi Pemerintah Daerah OKU Timur

Bagi pemerintah daerah diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, khususnya pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*).

3. Manfaat bagi almamater

Hasil penelitian dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang memiliki topik relatif sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul. (2015). BPK temukan penyimpangan perjalanan dinas DPRD dan 2 SKPD Kab. OKU Timur. Melalui ([www. Binpers.com](http://www.Binpers.com)) diakses Rabu, 10 juli 2015.
- Abdul Halim. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Salemba Empat: Jakarta.
- Abdul Halim, dan Iqbal M. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta
- Anne. (2018). Buruknya pengelolaan keuangan daerah dan rencana anne maju di pilkada purwakarta, melalui ([www. Kompasiana..com](http://www.Kompasiana.com)) diakses 08 Februari 2018
- Ani,S. 2018. *Pengantar pemerintahan daerah kajian teori, hukum, dan aplikasinya*. Sinar Grafika. Jakarta
- Arifin, T. 2015. Kebijakan publik dan Transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah. ALFABETA : Bandung
- Baldric Siregar. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. UPP STIM YKPN : Yogyakarta
- Bambang, S. Dadang, S. dan Agung, M. 2017. *Kebijakan akuntansi akrual pemerintah daerah*. Ghalia Indonesia : Bogor
- Deddi, N. dan Ayuningtyas,H. 2010. *Akuntansi Sektor Publik* . Salemba Empat : Jakarta.
- Diana Nova Lingtong, David Paul Elia Saerang, dan Venjte Ilat. 2017. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Kotamobagu. Vol 06. No 01.
- Dwi Ralmono, dan Sholihin, M. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. UPP STIM YKPN : Yogyakarta
- Fanny Jitmau, Lintje Kalangi, dan Linda Lambey. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Vol 8. NO 1.

- Fernandes, Wanda. 2015. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Vol. 2 No. 2.
- Hari Setiyono. (2018). Eks direktur RSUD OKU Timur jadi tersangka korupsi gaji dokter fiktif. Melalui ([www. Merdeka.com](http://www.Merdeka.com)) diakses jum'at 23 maret 2018.
- Hasibuan, H. Malayu SP. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Bumi Aksara Jakarta.
- Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta.
- Indra Bastian. 2011. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat: Jakarta.
- Imam Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisa Multivariate IBM SPSS 21*. UNDIP PRESS. Semarang.
- Jones, R. dan Pendlebury. 2010. *Public Sector Accounting*. Pearson Education Limited
- Kariangan, Hendra. 2017. *Carur-marut pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah perspektif hukum dan publik*. Kencana
- Kerangka Konseptual, Standar Akuntabilitas Pemerintah. 2015
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN : Yogyakarta.
- Mahmudi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press: Yogyakarta.
- Mohamad Mahsun. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE : Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI : Yogyakarta.
- Muindro Renyowijoyo. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non laba*. Mitra Wacana Media :
- Ni Luh Putu Uttari Premananda, Made Yenni Latrini. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja pada Pemerintah Kota Denpasar. Vol.18 No.3
- Nunik handayani. (2017). Temuan atas penyimpangan pengelolaan APBD yang berpotensi merugikan keuangan daerah di kab. Musi Banyuasin. Melalui ([https.info-anggaran.com](https://info-anggaran.com)) diakses 05 Mei 2017

Nopriansyah Putra, Erlina, dan Tapi Anda Sari. 2016. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderating Pada Provinsi Sumatera Utara. Vol 19. No 4

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 tahun 2014

Sekaran, Uma. (2017). *Research Methods for business*. Edisi dan 2. Salemba Empat : Jakarta

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. PT ALFABETA :Bandung

Sri Adiningsih. Pengelolaan keuangan daerah masih buruk. Melalui (www.Sindonews.com) diakses Senin 03 April 2017